P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa

Rahmi Meutia [1)], Muhammad Amar [2)]

Fakultas Ekonomi Universitas Samudra
[1)] ***e-mail:*** rahmi.meutia@unsam.ac.id
[2)] ***e-mail:*** *amarmuhammad574@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 responden dari 36 SKPD. Metode analisis data menggunakan persamaan regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F) serta uji koefisien determinasi (*R Square*). Hasil penelitian diperoleh persamaan $Y = 1.350 + 0.343X_1 + 0.519X_2 + 0.064X_3$. Hasil uji hipotesis secara parsial pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. Hasil uji hipotesis secara simultan, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. Hasil uji koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.796 atau sebesar 79,6% variabel pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa.

Kata kunci : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

1. PENDAHULUAN

Wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah di Indonesia pada saat ini adalah tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Pelaporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah haruslah transparan untuk mencapai *good governance* (*accounting for governance*). Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, *profesionalisme* dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah. Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna kebutuhan informasi laporan keuangan tersebut seperti masyarakat, pemerintah, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, inverstasi dan pinjaman. Maka dari itu, pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*), Mardiasmo (2009).

Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang mempunyai nilai dan berguna bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Kota Langsa yang salah satu misinya tersebut adalah melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan agar lebih responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berbasiskan *smartcity* (*e-goverment*).

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Langsa berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, agar mampumenyalurkan informasi keuangan daerah yang berkualitas sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada publik. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat ini. Namun yang menjadi kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Selain itu hal lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Secara konseptual komitmen organisasi merupakan faktor internal (*internalsid*e) dalam diri setiap pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

bersangkutan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Komitmen organisasi menunjukan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik. Jadi jika komitmen suatu organisasi baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan andal, serta akan menjaga kepatuhan presentasi pemerintah dari laporan keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) diandalkan.

Dalam hal ini, tidak terkecuali sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat diandalkan dan tepat waktu. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari salah satu instansi SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) masih belum sepenuhnya berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga belum sepenuhnya mampu menyusun laporan keuangan. Begitu pula pegawai yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan, masih banyak yang belum memahami sepenuhnya akan tugas dan tanggungjawab, sistem akuntansi dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Data Kepala Bagian Keuangan SKPD Kota Langsa

Data Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa								
No	Item	Akuntansi	%	Ekonomi	%	Non Ekonomi	%	Total
1.	Kepala Bagian Keuangan	2	5,5	22	61,1	12	33,3	36
	Total	2		22		12		36

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang menjabat sebagai Kabag keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebesar 5,5%, berlatar pendidikan ekonomi sebesar 61,1%, dan yang berlatar pendidikan non ekonomi sebesar 33,3%. Hal inilah yang menyebabkan Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Langsa belum maksimal. Untuk itu sangat diperlukan komitmen PPK-SKPD yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan peraturan yang terkait.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Nilai Informasi

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

Suwardjono (2005) menyatakan nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Suwardjono (2005) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai.

Menurut Celviana dan Rahmawati (2010) Nilai informasi yang penting terkait mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka nilai informasi harus mempunyai beberapa definisi dalam pengambilan keputusan sebagai berikut: Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Sedangkan menurut Utari dan Syaiful (2008) Ketepatwaktuan adalah salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan dapat disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Pengukuran Nilai Informasi

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam Estiyanti Dkk (2017), antara lain :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
   a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut PP 71 Tahun 2010 keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Indikator keterandalan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Adanya transaksi keuangan yang jujur dan wajar.
2. Adanya laporan keuangan pokok sesuai aturan yaitu: Neraca.
3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD.
4. Catatan atas laporan keuangan.
5. Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji.
6. Adanya rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik.
7. Informasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umum.

Menurut PP 71 Tahun 2010 ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Indikator untuk mengukur ketepatwaktuan pelaporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
2. Laporan-laporan berikut disediakan secara sistematis dan teratur.
   a. Laporan harian.
   b. Laporan mingguan.
   c. Laporan bulanan.
   d. Laporan semester.
   e. Laporan tahunan.
3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur.
   a. Laporan realisasi semester pertama.
   b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD.
   c. Neraca.
   d. Catatan atas laporan keuangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Yani (2008) teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk mengelola data: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi mencakup: pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik,

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Pemerintah, dalam Putri (2017). Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan keuangan yang andal dan sekaligus tepat waktu serta lebih efektif dan efisien dibandingkan secara manual.

Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Suyanto (2005), pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

1. Perangkat keras komputer (*hardware*). Perangkat keras bagi sesuatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan *file* dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.
2. Perangkat lunak komputer (*software*). Seperti sistem perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti sistem pengoperasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis komputer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: *e-commerce*, *DSS* (*Decision Support System*), *e-banking*, SAP, dan sebagainya.
3. Jaringan dan komunikasi. Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk mempermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

Menurut Winidyaningrum (2010), pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya:

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Menurut Sukirman (2012), indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki perangkat komputer.
2. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet.
3. Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi.
4. Menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Adanya laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi.
6. Adanya pemeliharaan peralatan.
7. Adanya perbaikan peralatan yang rusak/usang.

Berdasarkan uraian diatas, indikator pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil modifikasi peneliti, diantaranya: (1) Penggunaan komputer (*hardware* dan *software*), (2) penggunaan jaringan, (3) memiliki perangkat komputer, (4)

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

menggadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi, dan (5) menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komitmen Organisasi

Sultani (2009) menyatakan komitmen organisasi adalah keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Sedangkan menurut Lubis (2010) Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan profesi, antara lain:

a. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
b. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
c. Loyalitas (*loyality*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Menurut Lubis (2010) tiga komponen utama mengenai komitmen organisasi:

1. Komitmen afektif. Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional atau psikologis terhadap organisasi.
2. Komitmen kontinu. Terjadi apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.
3. Komitmen normatif. Timbul dari nilai-nilai diri karyawan itu sendiri. Jadi karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi tersebut merupakaan hal yang memang harus dilakukan.

Pengukuran Komitmen Organisasi

Allen dan Meyer (dalam Robbins dan Judge 2008), terdapat tiga dimensi terpisah komitmen organisasi, sebagai berikut:

1. Komitmen afektif (*affective commitment*), merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
   Indikatornya:
   a. Ada rasa memiliki organisasi ini.
   b. Bangga menjadi bagian organisasi ini.
   c. Bangga dapat bekerja dalam organisasi ini.
   d. Bahagia apabila dapat menghabiskan karir dalam organisasi ini.
2. Komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*), merupakan nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.
   Indikatornya:
   a. Membutuhkan pekerjaan yang dilakukan saat ini.
   b. Nyaman melakukan pekerjaan yang diberikan organisasi.
   c. Termotivasi untuk mendapatkan kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Komitmen normatif (*normative commitment*), merupakan kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

Indikatornya:

a. Ada rasa puas atas pekerjaan yang telah diberikan oleh organisasi.
b. Dapat bekerja sesuai harapan organisasi.
c. Ada keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian organisasi.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Mathis dan Jackson (2006), sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Rivai (2004) juga mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia terbagi dalam dua hal diantaranya : pertama secara mikro yaitu perbaikan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan yang terlibat dalam persaingan global, serta yang kedua secara makro yaitu perbaikan angkatan kerja dalam skala nasional. Zuliarti (2012) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut Nawawi dalam Sedarmayanti (2009) mengatakan ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan.
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (*non material/non financial*) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Griffin dalam Delanno (2013), kapasitas sumber daya manusia dapat diukur melalui:

1. Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku sesorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.
2. Pelatihan. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaanya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.
3. Pengalaman. Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

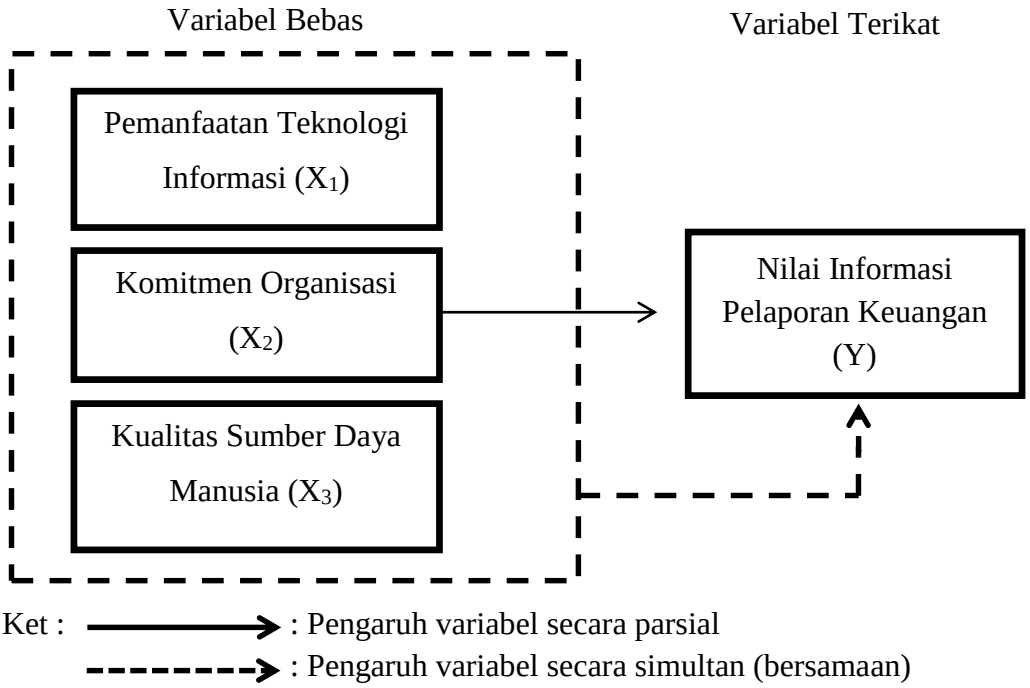
Menurut Alimbudiono, Sandra dan Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari:

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

1. Tanggung Jawab**.** Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas. Tanggung jawab yang baik adalah dapat memahami dan melaksanakan tugas sesuai deskripsi jabatan.
2. Keterampilan**.** Keterampilan dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan uraian diatas, indikator kapasitas sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari hasil modifikasi peneliti, diantaranya: (1) latar belakang pendidikan, (2) pelatihan, (3) pengalaman, (4) tanggung jawab dan (5) keterampilan.

Kerangka Konseptual



3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di Kota Langsa. Waktu penelitian dilakukan tahun 2020.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di kota langsa yang melayani kepentingan masyarakat. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 36 SKPD.

Menurut Sugiyono (2008) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian keuanganyang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada SKPD kota langsa. Jumlah

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

sampel yang mewakili populasi dalam penelitian ini adalah 72 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* (pemilihan sampel bertujuan) yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2012). Pertimbangannya sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Keuangan SKPD Kota Langsa.
2. Pegawai Bagian Keuangan SKPD dengan masa kerja minimal 1 tahun.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa bagian keuangan adalah pihak yang terlibat dalam proses pembuatan laporan keuangan, kepala keuangan SKPD merupakan pihak yang mempunyai wewenang dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya, perhitungan anggaran, serta membina mengawasi, mengendalikan dan mengelola keuangan pemerintah daerah PP No 58 2005 dalam Haviva Lailatul (2014). Sedangkan penentuan kriteria responden yang masa kerjanya minimal 1 tahun dikarenakan pegawai yang masa kerjanya minimal 1 tahun sudah memiliki pengalaman yang cukup memadai dibidang pembukuan dan mengerti tentang pembuatan laporan keuangan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa yang antara lain adalah pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia menggunakan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Y	= Dependen variabel
$\boldsymbol{\alpha}$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel
X_1, X_2, X_3	= Independen variabel
$\boldsymbol{\epsilon}$	= *Error*

Persamaan regresi linier berganda diatas dimodifikasi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	= Nilai informasi pelaporan keuangan
$\boldsymbol{\alpha}$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel
X_1	= Pemanfaatan teknologi informasi
X_2	= Komitmen organisasi
X_3	= Kualitas sumber daya manusia
$\boldsymbol{\epsilon}$	= *Error*

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

1. Uji t (uji parsial)
   Uji t digunakan untuk membuktikan`apakah terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi (X_1), komitmen organisasi (X_2) dan kualitas sumber daya manusia (X_3) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (Y).
2. Uji F (uji simultan)
   Uji F digunakan untuk membuktikan`apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara pemanfaatan teknologi informasi (X_1), komitmen organisasi (X_2) dan kualitas sumber daya manusia (X_3) secara simultan antara variabel independen (X) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (Y).
3. Koefisien Determinasi (R^2)
   Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel independen (pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia) yang mampu menjelaskan variasi variabel dependennya (nilai informasi pelaporan keuangan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi

Dalam mengetahui pengaruh variabel independen (pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia) terhadap variabel dependen (nilai informasi pelaporan keuangan) digunakan analisis regresi linier berganda yang diolah melalui program SPSS, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik

Variabel	B	t	Sig t
Konstanta	1.350	1,372	0,175
Pemanfaatan teknologi informasi	0,343	2,891	0,005
Komitmen organisasi	0,519	5,145	0,000
Kualitas sumber daya manusia	0,064	0,614	0,541
R Square	0,796		
F	93,501		
Sig. F	0,000		

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 1.350 + 0{,}343X_1 + 0{,}519X_2 + 0{,}064X_3}$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,350 menunjukkan nilai informasi pelaporan keuangan apabila kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi bernilai tetap.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan pengaruh yang positif dengan kepuasan kerja sebesar 0,343. Dengan kata lain, apabila pemanfaatan teknologi informasi naik satu satuan maka nilai informasi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0,343 satuan dengan asumsi variabel komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia bernilai tetap.
3. Variabel komitmen organisasi menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai informasi pelaporan keuangan sebesar 0,519. Dengan kata lain, apabila komitmen organisasi naik satu satuan maka nilai informasi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0,519 satuan dengan asumsi variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia bernilai tetap.
4. Variabel kualitas sumber daya manusia menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai informasi pelaporan keuangan sebesar 0.064. Dengan kata lain, apabila kualitas sumber daya manusia naik satu satuan maka nilai informasi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0.064 satuan dengan asumsi variabel pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi bernilai tetap.

Pembuktian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dengan menggunakan uji t, uji F serta uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

1. Hasil uji secara parsial (uji t)
   Uji t dilakukan dengan membandingkan t sig pada Tabel 2 dan nilai α 5%, hasil uji t sebagai berikut:
   a. Variabel pemanfaatan teknologi informasi t sig < α 5% (0,005 < 0,05), maka dapat dinyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, dapat diterima. Hal ini sesuai dengan dengan pendapat Indriasari, dkk (2008) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, serta didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Windyaningrum dan Rahmawati (2010) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.
   b. Variabel komitmen organisasi t sig < α 5% (0,000< 0,05), maka dapat dinyatakan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, dapat diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosalin dan Kawedar (2011) yang membuktikan adanya pengaruh positif komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan di Badan Layanan Umum, serta

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Nivo (2013) yang menyatakan bahwa karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi. Sejalan dengan penelitian yang menujukan bahwa komitmen oeganisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

c. Variabel kualitas sumber daya manusia t sig > α 5% (0,541 > 0,05), maka dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, ditolak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Artinya jika suatu instansi pemerintah memiliki kualitas sumber daya manusia (X_1) yang kurang kompeten maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan mengalami penurunan kinerja.

2. Hasil uji secara simultan (uji F)
   Berdasarkan Tabel 1 diketahui nilai F sig < α 5% dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemda (Study Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Solok), di mana variabel kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

3. Koefisien determinasi (R^2)
   Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,796 atau sebesar 79,6% variabel pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. Sisanya sebesar 20.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi pejabat dan lain sebagainya.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Hasil uji secara parsial (uji t) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, sehingga hipotesis pertama diterima. Komitmen organisasi berpengaruh

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, sehingga hipotesis kedua diterima. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

2. Hasil uji F menyatakan pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa, sehingga hipotesis keempat diterima.

6. REFERENSI

Alimbudiono, Ria, S. dan Fidelis. (2004). "Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik." **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik**. Vol. 05 No. 02.18-30.

Aritonang, Aldiani Sultani dan Firman Syarif. 2009. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. **Jurnal akuntansi** vol.12.

Celviana, Winidyaningrum dan Rahmawati 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Study Empiris di Pemerintah Daerah Subosukawonosraten). **Simposium Nasional Xiii Purwokerto.**

Delanno, Galuh, F. dan Deviani. (2013). "Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Iinformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah." **Jurnal Wahana Riset Akuntansi (WRA).**

Estiyanti, Ni Made, Dkk. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Efektivitas Pengendalian Intern pada Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar. **Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi.** Vol. 23, No. 2, Hal 106 – 121.

Ghozali, Imam. 2013. **Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang** : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haviva, Lailatul. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada SKPD di Kabupaten Jember). **Artikel Ilmiah Mahasiswa Jurusan Akuntansi**, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Lubis., A.I. 2010. **Akuntansi keperilakuan**. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi: Yogyakarta.

Mathis, Robert.L & Jackson, Jhon.J. 2006. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 **Tentang : Standar Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523

Putri, Rita Dwi. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemda (Study Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Solok). **Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas.** Vol. 19 No. 1, Hal 134-149.

Rivai, Veithzal. 2004. **Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik**. Jakarta: Pt. Raja Grafindopersada.

Rosalin, F & Kawedar, W. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada Blu Di Kota Semarang). **Thesis**, Universitas Diponegoro.

Sedarmayanti. 2009. Sumber **Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Bisnis**, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. **Statistik Untuk Pendidikan**. Bandung: Alfabeta.

Sukirman, Sularso, dan Nugraheni. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi ." **Jurnal Universitas Jenderal Soedirman.**

Suwardjono. 2012. **Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan**. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Suyanto. (2005). **Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis**. Yogyakarta: Andi.

Utari Hilmi, Syaiful Ali. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2009". **Jurnal Akuntansi**.

Winidyaningrum, C. 2010. "Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi." **Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA)**. ***STIE STP*.Pignatelli Surakarta**.

Yani, Muhammad. dkk. 2008. **Pengantar Teknologi Informasi. Bandung**: Cv. Lubuk Agung.

Zuliarti. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada Pemerintah Kabupaten Kudus). **Skripsi**. Universitas Muria Kudus.